Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12, Number 1, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

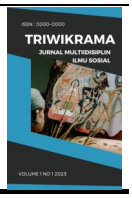

OPINI PUBLIK TENTANG KETERLIBATAN INDONESIA DALAM *BOARD OF PEACE*

Safira Zahra, Wildah Dwi Maulia, Sarah Ramadina, Nanda Andini, Nova Annur Rahmawati, Muhammad Kahfi

Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2026

Revised Juli, 2026

Accepted Jui, 2026

Available online Juli, 2026

szramadhani21@gmail.com,
dwimauliawildah@gmail.com,
sadriinb@gmail.com,
nandaandini18@gmail.com,
novaannur06@gmail.com,
muhammadkahfi189@gmail.com,

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut berkembang melalui media massa dan media sosial sehingga membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik mengenai keterlibatan Indonesia dalam BOP serta mengetahui peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi komentar warganet di media sosial, analisis pemberitaan media daring, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung bersikap kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP karena mempertanyakan legitimasi forum, kepentingan politik di balik pembentukannya, serta relevansinya terhadap politik luar negeri Indonesia. Di sisi lain, sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Penelitian ini juga menemukan bahwa media massa dan media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi publik melalui cara pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai *Board of Peace.*

Kata Kunci: *Board of Peace*, opini publik, media massa, media sosial, politik luar negeri.

Abstract

Indonesia's participation in the Board of Peace (BOP), initiated by United States President Donald Trump, has generated diverse public responses. These differing views have developed through mass media and social media, shaping public opinion regarding the government's policy. This study aims to analyze public opinion on Indonesia's involvement in the BOP and examine the role of the media in shaping public perceptions of the issue. The research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations of

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

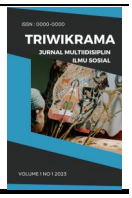

public comments on social media, analysis of online news coverage, and documentation as data collection techniques. The findings show that the majority of the public expressed critical views toward Indonesia's participation in the BOP by questioning the forum's legitimacy, the political interests behind its establishment, and its relevance to Indonesia's foreign policy. On the other hand, some members of the public supported the policy as a reflection of Indonesia's commitment to promoting world peace. The study also found that both mass media and social media play a significant role in shaping public perception through news framing and the dissemination of information about the Board of Peace.

Keywords: *Board of Peace, public opinion, mass media, social media, foreign policy.*

PENDAHULUAN

Keputusan Indonesia bergabung dalam *Board of Peace* (BOP) pada awal 2026 memunculkan perdebatan di ruang publik. Pemerintah menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan bentuk komitmen terhadap upaya perdamaian dunia sekaligus implementasi politik luar negeri bebas aktif. Langkah tersebut juga dikaitkan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Kompas.com, 2026).

Keputusan tersebut kemudian memunculkan tanggapan yang berbeda. Sebagian masyarakat mendukung karena menilai Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik internasional, khususnya konflik Palestina. Sebaliknya, sebagian lainnya mempertanyakan kredibilitas *Board of Peace* dan menilai forum tersebut belum mampu mencerminkan prinsip perdamaian yang adil. Kritik juga datang dari sejumlah pihak yang menilai keterlibatan Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan diplomatik serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia (Media Indonesia, 2026).

Perbedaan pandangan tersebut berkembang melalui pemberitaan media massa dan media sosial sehingga membentuk opini publik yang beragam. Dalam kajian komunikasi politik, opini publik menjadi bagian penting karena menunjukkan bagaimana masyarakat menilai dan memaknai suatu kebijakan publik (Situopu, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis opini publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya, serta bagaimana media membingkai isu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap kebijakan masuknya Indonesia ke *Board of Peace*, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan opini publik dalam isu tersebut, serta mengkaji bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace.*

TINJAUAN PUSTAKA

Opini publik dicetuskan dalam bahasa Inggris yakni *public opinion*, lalu kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dengan istilah opini publik. Menurut Gun Gun Heryanto (2013:61) Opini merupakan suatu tanggapan aktif terhadap dorongan dari tanggapan yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang citra atau image. Sedangkan publik adalah suatu kumpulan orang-orang yang sama dalam mempunyai minat dan kepentingannya terhadap sesuatu isu. Jadi, yang dimaksud dengan opini publik, yaitu suatu opini yang menyangkut isu atau kejadian yang mengandung keprihatinan (*concern*) publik. Dengan demikian, opini

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

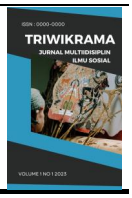

publik bukan karena banyaknya jumlah orang, melainkan karena sifatnya yang menyangkut isu publik.

Sejalan dengan itu, James Bryce memandang opini publik merupakan kumpulan pendapat dari sejumlah orang tentang masalah-masalah yang dapat memengaruhi atau menarik minat atau perhatian masyarakat di dalam suatu daerah tertentu, sedangkan Anwar Arifin (2011:193) menjelaskan opini publik merupakan pendapat rata-rata individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi yang telah disebutkan, untuk memecahkan sebuah persoalan, salah satunya yang beredar di media massa.

Dalam penulisan ini, pembentukan opini publik dianalisa menggunakan konsep dalam buku yang berjudul Opini Public, Bernard Hennessy (1990), menjelaskan lima faktor pembentuk opini publik, yaitu *Presence of an issue* (isu yang mengharuskan terdapat konsensus yang sesungguhnya), *Nature of public* (kelompok yang dikenal dan berkepentingan terhadap suatu isu), *Complex of preferences* (pilihan sulit yang mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu), *Expression of opinion* (terdapat suata opini dari berbagai pernyataan yang ditulis atau diucapkan bertumpuk sekitar isu), *Number of person involved* (sejumlah orang terlibat dalam opini publik yang merupakan besarnya masyarakat yang mena ruh perhatian terhadap suatu isu).

Selain itu, penulisan ini menggunakan teori komunikasi politik yang relevan untuk memahami pembentukan opini publik diantaranya adalah Agenda Setting diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw bahwa Agenda Setting menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus dan prioritas isu dalam opini publik. Tentunya, Agenda Setting menggambarkan pengaruh yang kuat dari media, terutama kemampuannya untuk meranking isu isu apa yang penting dan tidak. Framing, Lupton dan Deborah (2015:74) menjelaskan Kalau framing akan lebih fokus dengan bagaimana sebuah isu tersebut disajikan. Mulai dari pemilihan kata, cara pandang, dan bagian cerita yang ditampilkan atau diabaikan. Dengan menyajikan isu dalam cara tertentu, media bisa mempengaruhi bagaimana orang memahami informasi.

Tak hanya itu dalam buku Komunikas Politik sebuah pengantar Gun Gun Heryanto (2013:69) pembentukan opini publik dijelaskan beberapa teori yaitu sebagai berikut *Hypodermic Needle Theory*, merupakan teori yang dapat menyuntikkan informasi secara berulang-ulang kepada khalayak agar tercipta opini publik. *The Spiral of Silence Theory*, teori yang dicetuskan oleh Elisabeth Noelle-Neumann, Terdapat empat unsur pokok yang dibangun yakni media massa, komunikasi antarpribadi dan jalinan interaksi sosial, statemen individu tentang suatu hal dan persepsi orang lain maupun kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan, penerimaan atas opini publik sebagai akibat kuatnya kecenderungan orang-orang di sekitarnya. *Bandwagon Effect Theory*, teori ini menjelaskan adanya situasi yang menunjukkan ketika seseorang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan pendapat mayoritas orang banyak di sekitarnya.

Tentunya Konsep-konsep dan teori teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis opini publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* pada bagian analisa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan opini publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan bahasa pada konteks yang alamiah (Moleong, 2012). Objek kajian dalam penelitian ini adalah opini publik yang berkembang di media sosial dan media massa terkait kebijakan Indonesia bergabung dengan BOP selama periode Januari hingga April

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

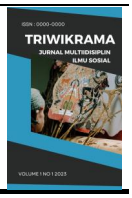

2026. Penelitian difokuskan pada tiga hal, yakni kecenderungan opini mayoritas dan minoritas masyarakat, faktor-faktor pembentuk opini publik berdasarkan teori Bernard Hennessy yang meliputi p*resence of an issue*, *nature of public*, *complex of preferences*, *expression of opinion*, dan *number of persons involved*, serta bingkai pemberitaan media terhadap isu tersebut. Sumber data yang digunakan berupa kata-kata lisan dan tertulis, serta dokumentasi visual yang diamati secara langsung oleh peneliti (Arikunto, 2011). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Asrinaldi, dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, dan Virtuous Setyaka, dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas, yang dipilih karena keduanya memiliki keahlian di bidang politik luar negeri dan komunikasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur secara daring melalui Google Meet, pengamatan terhadap komentar warganet pada YouTube, TikTok, X (Twitter), dan Instagram, serta penelusuran pemberitaan media daring seperti ANTARA News, Kompas, Kompas TV, Detik.com, dan Tempo.co. Untuk melihat intensitas perhatian publik terhadap isu ini, peneliti juga menggunakan data dari Google Trends dan social-searcher.com. Data yang telah terkumpul kemudian dicari dan disusun secara sistematis dari hasil wawancara, komentar warganet, dan pemberitaan media agar lebih mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pembaca (Bogdan dalam Sugiyono, 2018). Proses ini mencakup pengelompokan hasil wawancara berdasarkan lima faktor pembentuk opini publik Hennessy, penyajian data komentar dan pemberitaan media, hingga penarikan kesimpulan mengenai kecenderungan opini publik dan pola pembingkaian media terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Board of Peace (BOP) merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 15 Januari 2026 sebagai forum internasional yang bertujuan mendorong penyelesaian berbagai konflik global. Pada tahap awal, forum ini difokuskan pada penyelesaian konflik Palestina–Israel, khususnya di Gaza, sebelum diperluas ke berbagai isu internasional lainnya. Kehadiran *Board of Peace* diarahkan sebagai wadah koordinasi antarnegara dalam mencari solusi damai atas berbagai konflik. Namun, berbeda dengan lembaga internasional yang telah memiliki legitimasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Board of Peace* dinilai masih bersifat politis dan belum memiliki legitimasi global yang kuat. Selain itu, struktur organisasi dan mekanisme keanggotaannya juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan dalam sistem kerja sama internasional (Mahmood, 2026).

Pembentukan *Board of Peace* memperoleh respons yang beragam dari berbagai negara. Indonesia bersama beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Turki, Mesir, dan Arab Saudi, menyatakan kesediaannya untuk bergabung sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik, khususnya konflik Palestina–Israel. Sikap tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada perdamaian dunia. Sebaliknya, beberapa negara Eropa, seperti Norwegia, Swedia, dan Prancis, memilih bersikap hati-hati bahkan menolak inisiatif tersebut karena dikhawatirkan dapat mengurangi peran Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga utama dalam menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, Rusia dan Cina belum menunjukkan sikap yang tegas mengingat posisi keduanya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto (Tempo.co, 2026).

Keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut dipandang sebagai implementasi politik luar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

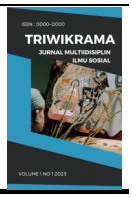

negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui partisipasi dalam *Board of Peace*, Indonesia berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung diplomasi damai, memperkuat koordinasi internasional, serta berkontribusi dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Selain itu, keterlibatan Indonesia juga mencerminkan posisinya sebagai negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim yang berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam penyelesaian konflik internasional (Detik.com, 2026).

Kronologi keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* diawali dengan undangan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa keputusan untuk bergabung didasarkan pada amanat konstitusi untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Seiring berkembangnya informasi di ruang publik, keputusan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menilai *Board of Peace* dapat menjadi sarana bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih aktif dalam memperjuangkan perdamaian Palestina. Di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas forum tersebut mengingat kompleksitas konflik yang terjadi serta belum adanya legitimasi internasional yang kuat. Dalam proses tersebut, media massa turut berperan dalam membentuk persepsi publik melalui pemberitaan yang menghadirkan berbagai sudut pandang dari pemerintah, akademisi, maupun pengamat hubungan internasional (Tempo.co, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asrinaldi, reaksi awal terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* dari kalangan akademisi cenderung bersifat kritis. Meskipun keputusan pemerintah dipahami sebagai implementasi amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia, efektivitas *Board of Peace* masih dipertanyakan karena sangat bergantung pada komitmen negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, latar belakang Donald Trump sebagai penggagas forum tersebut juga memunculkan kekhawatiran bahwa *Board of Peace* tidak sepenuhnya terlepas dari kepentingan politik sehingga manfaat konkret bagi Indonesia masih perlu dikaji lebih lanjut **(Asrinaldi,** wawancara melalui Google Meet, 15 April 2026).

Menurut Virtuous, persepsi publik terhadap *Board of Peace* tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh framing media massa terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah. Pemberitaan yang berkembang di ruang publik turut membentuk sikap skeptis masyarakat terhadap efektivitas forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga memengaruhi pembentukan opini publik di dalam negeri (Virtuous, wawancara melalui Google Meet, 9 April 2026).

Temuan Penelitian

Opini Publik Mayoritas dan Minoritas terhadap Keterlibatan Indonesia dalam BOP.

Keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP) memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Meskipun pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam menjaga perdamaian dunia, respons publik menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam

Mayoritas opini publik cenderung menunjukkan sikap penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP. Kelompok ini menilai bahwa manfaat langsung dari keikutsertaan Indonesia belum terlihat secara jelas dan lebih bersifat simbolik daripada

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

substantif. Selain itu, sebagian masyarakat mempertanyakan urgensi keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ketika masih terdapat berbagai persoalan domestik yang dinilai lebih mendesak untuk diselesaikan.

Pandangan kritis juga muncul dari kalangan akademisi. Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Asrinaldi, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas dan Dr. Virtuous Setyaka, Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas. menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak imperialisme dan kolonialisme. Narasumber menilai bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara besar. Bahkan, agenda rekonstruksi Gaza dinilai berpotensi menjadi instrumen kepentingan ekonomi pihak tertentu dan belum melibatkan Palestina secara penuh sebagai pihak yang paling terdampak konflik.

Penolakan publik juga terlihat di media sosial. Berbagai komentar dalam unggahan akun milik *@Andrea Yudias* di platform X menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah bergabung dalam BOP. Sebagian masyarakat menilai bahwa keterlibatan Indonesia justru berpotensi merugikan citra dan independensi politik luar negeri Indonesia serta mengurangi kepercayaan negara lain terhadap posisi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif.

Selain aspek politik, kelompok yang menolak juga menyoroti potensi kontribusi dana yang mencapai sekitar USD 1 miliar atau setara dengan Rp17 triliun. Dana tersebut dinilai lebih tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Di sisi lain, terdapat kelompok minoritas yang mendukung keputusan pemerintah untuk bergabung dalam BOP. Kelompok ini memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis yang didasarkan pada pertimbangan matang dan kepentingan jangka panjang Indonesia. Berdasarkan data yang diambil melalui postingan sosial media di akun media *Inilah.com* dan *OfficialiNews*, menurut kelompok pendukung, keterlibatan dalam BOP dapat meningkatkan reputasi internasional Indonesia dan menunjukkan komitmen negara dalam mendukung perdamaian global.

Sebagian masyarakat, salah satunya aktivis literasi digital Putra Aji Sujati, juga menilai bahwa kebijakan luar negeri merupakan ranah yang membutuhkan pertimbangan strategis dan tidak dapat dinilai secara sederhana oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, keputusan pemerintah dipandang sebagai hasil kajian yang telah mempertimbangkan berbagai aspek politik, keamanan, dan diplomasi internasional.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan besar dalam opini publik. Kelompok mayoritas cenderung menolak keterlibatan Indonesia karena dianggap berpotensi merugikan posisi politik luar negeri Indonesia, sedangkan kelompok minoritas mendukung karena dinilai mampu memperkuat peran diplomasi dan reputasi internasional Indonesia.

Faktor-Faktor Pembentuk Opini Publik terhadap Kasus *Board of Peace.*

Penelitian ini menemukan lima faktor pembentuk opini publik menurut Bernard Hennessy yang relevan dalam menjelaskan respons masyarakat terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP, Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut.

Presence of an Issue

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12, Number 1, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Gambar 1. Komentar warganet yang menunjukkan sikap penolakan, kritis, dan skeptis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace.* Sumber:Youtube BBC News Indonesia.

Gambar 2. Framing Positif Dari Media ANTARA News.

Gambar 3. Framing Kritis Atau Kontroversial Media Kompas TV

Berdasarkan data diatas menunjukan munculnya sikap kritis, skeptis, penolakan hingga dukungan masyarakat terhadap BOP di beberapa akun media, seperti *Youtube BBC News Indonesia*, *ANTARA News*, dan *Kompas Tv*, memperlihatkan beragam komentar dari masyarakat yang mempertanyakan fungsi Board of Peace dan membandingkannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa isu ini berhasil menarik perhatian publik dan berkembang menjadi bahan diskusi yang luas.

Nature Of Public

Gambar 4. Komentar Warganet Pada Konten Tiktok Terkait Board Of Peace. Sumber: Tiktok @urlovr

Terlihat dari karakter publik, salah satunya akun milik *@urlove* yang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga secara aktif memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian masyarakat memandang keterlibatan Indonesia dalam BOP sebagai langkah realistis untuk melindungi kepentingan nasional dan ekonomi. Sebagian lainnya melihat keputusan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan progresif dan upaya memperkuat perdamaian internasional. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa publik memiliki latar belakang pengetahuan, nilai, dan kepentingan yang beragam.

Complex of Preferences

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar 5. Komentar Warganet Yang Kontra Pada Video Youtube Kompas TV "Indonesia Gabung *Board Of Peace* Bentukan Donald Trump"

Komentar tersebut mencerminkan adanya perbedaan preferensi politik, ideologi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun aktor internasional. Seperti yang disampaikan salah satu warganet dalam akun @*SumanandarArena* yang kontra pada video *Youtube KompasTV* "Indonesia Gabung Board of Peace Bentukan Donald Trump" dengan menunjukkan sikap skeptis terhadap keterlibatan Indonesia karena dipengaruhi oleh persepsi historis dan politik terhadap Amerika Serikat serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam BOP.

Gambar 6. Komentar Warganet Yang Pro Pada Video Youtube Kompas TV "Indonesia Gabung *Board Of Peace* Bentukan Donald Trump"

Sebaliknya, berbeda dengan komentar sebelumnya, akun media sosial @Azzahroh_Official menunjukkan preferensi yang lebih mendukung pemerintah Indonesia. Komentar tersebut menyampaikan kepercayaan terhadap keputusan Presiden Prabowo meskipun tetap mengakui adanya kepentingan politik Amerika Serikat.

E*xpression of Opinion*

Gambar 7. Komentar Pro Dan Kontra Warganet Pada Video Youtube "Gabung *Board of Peace* Trump Panggung Diplomasi Indonesia" Sumber: Youtube @CNNIndonesia

Berdasarkan data di atas, terlihat berbagai bentuk ungkapan pendapat masyarakat di media sosial *YouTube @CNNIndonesia*. Pendapat yang disampaikan tidak hanya berupa argumentasi rasional, tetapi juga mengandung penilaian subjektif, harapan, keraguan, dan emosi terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa *expression of opinion* atau opini publik merupakan hasil dari interpretasi individu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan sudut pandang masing-masing.

Number of Persons Involved

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar 8. Pemberitaan Resmi Keterlibatan Presiden Prabowo Dalam Pertemuan Perdana BOP. Sumber: setkab.go.id.

Hal ini menunjukkan bahwa isu BOP berhasil menarik perhatian masyarakat dalam jumlah yang besar. Berdasarkan informasi dari *setkab.go.id* keterlibatan Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam pertemuan perdana BOP di Washington D.C. pada 19 Februari 2026. Hal ini tercatat resmi dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Artinya, keputusan Indonesia masuk ke dalam BOP bukan keputusan kecil, melainkan keputusan yang langsung diambil dan dihadiri oleh kepala negara, yang tentu saja menarik perhatian banyak pihak di dalam negeri. Isu ini juga mendapatkan jumlah respons pembahasan yang tinggi di media sosial sehingga menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi diskursus publik yang luas. Data dari berbagai platform digital dan Google Trends memperlihatkan tingginya minat masyarakat terhadap isu *Board of Peace* pada periode Februari hingga Maret 2026.

Bingkai Pemberitaan Media terhadap Masuknya Indonesia ke *Board of Peace* (BOP)

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP). Informasi mengenai BOP sebagian besar diperoleh masyarakat melalui pemberitaan media konvensional maupun media digital. Dalam isu politik luar negeri, masyarakat umumnya tidak mengalami secara langsung dinamika internasional yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, media menjadi sumber utama bagi publik untuk memahami perkembangan kebijakan pemerintah dan situasi geopolitik global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal keterlibatan Indonesia dalam BOP, media Indonesia cenderung memberitakan isu tersebut secara proporsional dan berimbang. Menurut Asrinaldi, media pada awalnya berupaya menghadirkan dua sisi pemberitaan, yaitu narasi pemerintah mengenai tujuan perdamaian yang diusung BOP serta pandangan masyarakat yang mempertanyakan urgensi keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi resmi pemerintah, tetapi juga memberikan ruang bagi munculnya berbagai perspektif di tengah masyarakat.

Namun, dinamika pemberitaan mengalami perubahan setelah terjadi perkembangan politik internasional baru, terutama pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pada fase ini, pemberitaan media mulai bergeser menjadi lebih kritis terhadap *Board of Peace* dan posisi Indonesia di dalamnya. Media tidak lagi hanya mengutip pernyataan pemerintah, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas kepada akademisi, pengamat politik, dan masyarakat yang mempertanyakan relevansi BOP sebagai forum perdamaian. Kritik tersebut muncul karena sejumlah negara yang dikaitkan dengan BOP justru kembali terlibat dalam tindakan militer di kawasan Timur Tengah. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan legitimasi BOP sebagai forum yang mengusung misi perdamaian.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan bingkai pemberitaan di antara media massa. Media ANTARA cenderung membingkai keterlibatan Indonesia dalam BOP secara positif. Hal ini terlihat dari penggunaan diksi “wujud nyata dukung Palestina” dalam pemberitaannya. Pemilihan frasa tersebut menempatkan keikutsertaan Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap perjuangan Palestina. Selain itu, penggunaan gambar Presiden Prabowo Subianto yang berjabat tangan dengan Donald Trump memperkuat citra kerja sama internasional dan diplomasi perdamaian global. Dalam konstruksi ini, *Board of Peace* diposisikan sebagai wadah diplomasi yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan peran aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

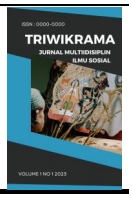

Sebaliknya, media Kompas membingkai isu *Board of Peace* secara lebih kritis dan kontroversial. Hal ini terlihat melalui judul berita, "Palestina Tidak Dilibatkan, Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Dipertanyakan". Penggunaan kata "dipertanyakan" menunjukkan adanya keraguan terhadap posisi Indonesia dalam BOP sekaligus menyoroti persoalan tidak dilibatkannya Palestina secara penuh dalam proses perdamaian. Bingkai pemberitaan ini membangun opini bahwa keberadaan *Board of Peace* masih menyisakan berbagai persoalan dan memunculkan perdebatan publik mengenai relevansi keterlibatan Indonesia di dalamnya.

Perbedaan pembingkaian tersebut menunjukkan bahwa media massa memiliki cara yang berbeda dalam mengonstruksi realitas mengenai *Board of Peace*. ANTARA cenderung membangun citra positif terhadap keterlibatan Indonesia dengan menekankan aspek diplomasi dan dukungan terhadap Palestina. Sementara itu, Kompas lebih menonjolkan sisi kontroversi dan kritik dengan mengangkat berbagai pertanyaan mengenai legitimasi forum tersebut serta posisi Indonesia di dalamnya. Dengan demikian, perbedaan framing media berpotensi menghasilkan persepsi publik yang berbeda terhadap isu yang sama.

Selain media arus utama, media sosial juga berperan penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap BOP. Penyebaran berita, komentar publik, opini tokoh, hingga potongan video pernyataan pejabat mempercepat terbentuknya persepsi kolektif di ruang digital. Sebelum terjadinya serangan Amerika Serikat terhadap Iran, respons publik di media sosial masih didominasi oleh candaan, kekhawatiran ringan, dan sikap skeptis terhadap kemungkinan Indonesia terlibat dalam konflik internasional. Sebagian warganet memandang isu ini sebagai sesuatu yang masih jauh dari kehidupan mereka sehingga belum memunculkan respons yang kritis dan masif.

Akan tetapi, setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran terjadi, persepsi publik mulai mengalami perubahan. Kritik terhadap *Board of Peace* meningkat tajam dan banyak pihak mulai mempertanyakan kredibilitas forum tersebut. Perubahan respons masyarakat ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membentuk agenda publik (agenda setting), menentukan sudut pandang terhadap suatu isu (framing), serta memengaruhi arah opini masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Dengan demikian, arah pemberitaan media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan menilai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace.*

Analisis

Opini Publik Mayoritas dan Minoritas dalam Merespons Kebijakann Masuknya Indonesia ke *Board of Peace* (BOP)

Isu keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP) berkembang menjadi perhatian publik yang luas karena bersinggungan dengan banyak aspek kehidupan, mulai dari politik luar negeri, kondisi ekonomi nasional, konflik Palestina dan Israel, hingga moralitas politik global. Kondisi ini sejalan dengan konsep opini publik yang dikemukakan Heryanto (2013), yaitu opini publik akan terbentuk ketika suatu isu dianggap menyangkut kepentingan bersama dan menarik perhatian masyarakat secara luas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung bersikap kritis, bahkan menolak, keterlibatan Indonesia dalam BOP. Sikap ini tampak dari komentar warganet di media sosial, pemberitaan media massa, serta hasil wawancara dengan akademisi yang mempertanyakan legitimasi forum tersebut. Sebagian besar masyarakat menilai BOP tidak sepenuhnya netral karena dianggap dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, terlebih forum ini diinisiasi oleh tokoh yang dianggap kontroversial dalam konflik

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

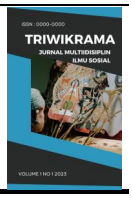

Palestina, yakni Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.

Salah satu narasumber ahli Poltik, Universitas Andalas, Asrinaldi menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum yang diinisiasi kedua tokoh tersebut merupakan langkah yang keliru karena Amerika Serikat dan Israel dinilai merepresentasikan karakter imperialis dan kolonialis yang bertentangan dengan prinsip konstitusional Indonesia. Merujuk pada konsep opini publik dari Bryce dalam Arifin (2011), komentar dan kritik yang terus berulang di ruang digital pada akhirnya membentuk kecenderungan opini mayoritas.

Ketika opini kritis terhadap BOP terus mendominasi ruang publik, persepsi masyarakat secara perlahan bergerak searah dengan opini tersebut. Selain aspek politik dan moral, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama munculnya opini negatif, terutama terkait potensi kontribusi dana Indonesia yang mencapai sekitar USD 1 miliar (setara Rp17 triliun), yang dinilai publik lebih mendesak untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan kelompok masyarakat yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam BOP. Kelompok ini memandang keputusan pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dunia. Namun demikian, opini kelompok pendukung ini secara kuantitas cenderung lebih sedikit termuat dibanding kelompok kritis, sebuah kondisi yang relevan dijelaskan melalui *Spiral of Silence Theory* dari Noelle-Neumann, yaitu kecenderungan kelompok minoritas untuk lebih diam agar tidak terisolasi secara sosial.

Di sisi lain, sebagian pendukung kebijakan ini turut dipengaruhi oleh *Bandwagon Effect Theory*, yakni kecenderungan mengikuti opini yang dianggap dominan atau berpengaruh, dalam hal ini kepercayaan bahwa keputusan Presiden Prabowo telah dipertimbangkan secara matang. Secara keseluruhan, dinamika opini publik ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik global dan forum internasional yang baru terbentuk. Masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi kebijakan luar negeri dan tidak lagi menerima narasi perdamaian secara pasif.

Faktor-faktor Pembentuk Opini Publik yang memengaruhi dalam Kasus *Board of Peace* (BOP)

Kelima faktor pembentuk opini publik menurut Hennessy (1990) *presence of an issue, nature of public, complex of preferences, expression of opinion, dan number of persons involved* terbukti relevan dan saling berkaitan dalam menjelaskan dinamika opini publik atas isu BOP. Faktor *presence of an issue* terlihat dari cepatnya isu BOP berkembang menjadi perbincangan luas karena dikaitkan langsung dengan konflik Palestina dan Israel, yang secara emosional dekat dengan masyarakat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Komentar warganet yang membandingkan fungsi BOP dengan PBB menunjukkan bahwa publik tidak menerima legitimasi forum ini secara pasif, melainkan turut mempertanyakan kepentingan politik di baliknya. Pada faktor *nature of public*, publik menunjukkan keterlibatan yang aktif lintas kalangan masyarakat umum, akademisi, media, hingga tokoh politik meski sebagian besar opini terbentuk dari potongan video maupun judul berita yang viral, bukan dari pemahaman geopolitik yang komprehensif, sehingga opini yang muncul cenderung lebih dipengaruhi sentimen emosional dibanding analisis yang utuh. Ringkasan keterkaitan kelima faktor tersebut dengan temuan penelitian dapat dilihat pada table 1.

Table 1. Faktor Pembentuk Opini Publik (Hennessy, 1990) Dalam Isu BOP.

Faktor Pembentuk	Temuan Penelitian	Kaitan Teori	Analisis

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

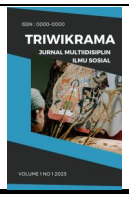

Presence of Issue	Isu BOP ramai dibahas karena dikaitkan dengan konflik PalestinaIsrael dan posisi politik luar negeri Indonesia	Suatu isu akan berkembang menjadi opini publik jika dianggap penting dan menyentuh kepentingan masyarakat	Isu BOP menjadi sensitif karena masyarakat masyarakat Indonesia memiliki kedekatan emosional terhadap Palestina sehingga respons publik muncul
Nature of Public	Masyarakat umum, akademisi, media, dan tokoh politik ikut memberikan tanggapan	Opini public terbentuk karena adanya kelompok yang merasa memiliki kepentingan terhadap isu	Masyarakat Indonesia saat ini lebih aktif dalam menilai kebijakan luar negeri dantidak lagi hanya menjadi penonton isu internasional
Complex of Preferences	Tedapat masyarakat yang menolak BOP dan ada yang mendukung pemerintah	Opini Pubik terbentuk perbedaan pengalaman, ideologi, dan sudut pandang masyarakat	Polarisasi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki cara pandang yang semakin beragam terhadap isu globa
Expression of Opinion	Opini disampaikan melalui TikTok, Instagram, X, Youtube dan kolom komentar media online	Opini Publik muncul pernyataan melalui yang disampaikan secara terbuka	Media sosial membuat penyebaran opini menjadi lebih cepat, tetapi juga membuat opini emosional lebih mudah viral
Number of Persons Involved	Isu BOP melibatkan pemerintah, media massa, tokoh publik, hingga jutaan masyarakat di media sosial	Semakin banyak orang yang terlibat maka opini publik semakin kuat terbentuk	Keterlibatan banyakpihak membuat isu BOP berubah dari isu diplomasi menjadi konsumsi publik nasional

Adapun *complex of preferences* tampak dari terbelahnya preferensi masyarakat: kelompok yang menolak BOP umumnya dipengaruhi sikap antiimperialisme dan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat, sedangkan kelompok pendukung melihat keterlibatan Indonesia sebagai strategi memperkuat posisi diplomatik di tingkat internasional. Pada dimensi *expression of opinion*, media sosial menjadi ruang utama ekspresi publik, di mana opini yang muncul tidak hanya berupa kritik rasional tetapi juga

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

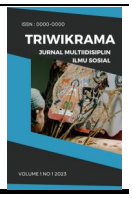

sarat muatan emosional seperti sindiran dan kemarahan kondisi yang turut menjelaskan mengapa opini kontroversial lebih mudah viral dibanding opini yang lebih objektif, sekaligus memicu gejala *spiral of silence* pada kelompok yang merasa opininya minoritas. Terakhir, faktor *number of persons involved* terlihat dari keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana BOP di Washington D.C., yang menjadikan isu ini mendapat perhatian luas dari tokoh politik, media massa, hingga masyarakat umum di media sosial, sehingga isu BOP berkembang dari sekadar wacana diplomasi menjadi konsumsi politik nasional.

Bingkai Pemberitaan Media Terhadap Peran Media Dalam Membentuk Persepsi Publik Terhadap Masyarakat Indonesia Ke *Board of Peace* (BOP)

Media massa dan media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP, mengingat sebagian besar masyarakat mengalami isu ini secara tidak langsung dan bergantung pada pemberitaan untuk memahaminya. Pada tahap awal, media cenderung menyajikan pemberitaan secara proporsional dengan menghadirkan dua sisi: narasi resmi pemerintah maupun pandangan kritis publik dan akademisi. Namun, arah pemberitaan berubah signifikan setelah terjadi eskalasi konflik internasional, khususnya pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Media mulai memberi ruang lebih luas bagi pandangan kritis dari akademisi dan pengamat politik yang mempertanyakan relevansi BOP sebagai forum perdamaian. Perubahan arah *framing* ini selaras dengan teori Agenda Setting (McCombs & Shaw), di mana intensitas pemberitaan mengenai konflik dan kepentingan politik dalam BOP mengarahkan fokus perhatian publik pada aspek tersebut. Proses *framing* juga tampak jelas dari perbedaan pembingkaian antarmedia misalnya media Kompas.com yang membingkai keterlibatan Indonesia secara positif sebagai wujud dukungan terhadap Palestina, berbanding dengan media lain yang menonjolkan sisi kontroversial dan mempertanyakan posisi Indonesia karena Palestina tidak dilibatkan penuh dalam forum tersebut. Perbandingan respons publik sebelum dan sesudah eskalasi konflik memperlihatkan pergeseran opini yang cukup drastis, dari sikap yang relatif santai dan minim kekhawatiran menjadi sikap kritis dan skeptis. Pola ini turut dapat dijelaskan melalui *Hypodermic Needle Theory*, di mana paparan informasi yang berulang mendorong masyarakat membentuk opini tertentu, serta *Bandwagon Effect*, yaitu kecenderungan individu mengikuti arus opini dominan yang berkembang di media sosial. Dengan demikian, media tidak sekadar berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membentuk realitas sosial dan memengaruhi cara masyarakat menilai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace.*

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) terbelah menjadi dua kecenderungan, dengan opini mayoritas bersikap kritis dan menolak, sementara opini minoritas mendukung keputusan pemerintah. Kelompok mayoritas menilai keikutsertaan Indonesia lebih bersifat simbolik, berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang antiimperialisme, serta mempersoalkan besarnya kontribusi dana di tengah kondisi ekonomi domestik yang belum stabil. Sebaliknya, kelompok minoritas memandang keputusan tersebut sebagai langkah diplomatik strategis yang dapat memperkuat reputasi internasional Indonesia sekaligus wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina.

Kelima faktor pembentuk opini publik menurut Hennessy (1990) terbukti relevan menjelaskan dinamika ini. Presence of an issue tampak dari kuatnya kedekatan emosional masyarakat Indonesia terhadap konflik Palestina–Israel; nature of public terlihat dari keterlibatan aktif berbagai kalangan mulai masyarakat umum hingga

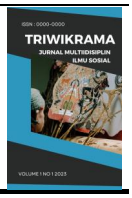

akademisi; complex of preferences tercermin dari polarisasi sikap pro-kontra yang dipengaruhi ideologi dan pengalaman politik masing-masing; expression of opinion terjadi secara masif melalui media sosial dengan muatan emosional yang mudah viral; dan number of persons involved diperkuat oleh keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana BOP, yang mengangkat isu ini dari sekadar wacana diplomasi menjadi konsumsi politik nasional. Temuan ini juga memperlihatkan gejala spiral of silence pada kelompok pendukung yang jumlahnya lebih sedikit, serta bandwagon effect pada sebagian masyarakat yang mengikuti kepercayaan terhadap keputusan pemerintah.

Dari sisi pembingkaian media, penelitian ini menemukan pergeseran arah pemberitaan dari yang semula proporsional menjadi lebih kritis setelah eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel terhadap Iran. Perbedaan framing antarmedia juga terlihat jelas: media seperti ANTARA cenderung membingkai isu secara positif dengan menonjolkan dukungan terhadap Palestina, sementara media seperti Kompas lebih menyoroti sisi kontroversial dan mempertanyakan legitimasi BOP karena Palestina tidak dilibatkan penuh. Perbedaan bingkai ini sejalan dengan teori Agenda Setting dan Framing, yang menunjukkan bahwa media tidak hanya menyalurkan informasi tetapi turut mengonstruksi realitas dan mengarahkan opini publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa opini publik terhadap BOP bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor politik, ekonomi, emosional, serta arus pemberitaan media. Kontribusi penelitian ini memperkaya kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks isu kebijakan luar negeri berskala internasional yang berkembang cepat di era digital. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan dan periode pengamatan, termasuk mengukur secara kuantitatif intensitas sentimen publik di media sosial, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan opini publik terhadap isu-isu geopolitik serupa di masa mendatang. Bagi pemerintah, disarankan agar kebijakan luar negeri yang melibatkan forum internasional baru seperti BOP dikomunikasikan secara lebih transparan kepada publik untuk meminimalkan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap arah politik luar negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A. (2011). Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Heryanto, G. G. (2013). Komunikasi politik sebuah pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia.

Heryanto, G. G.(2018). Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasai Media di pangung politik. Yogyakarta: IRCISoD.

Lupton, D. (2015). Digital sociology (livro).

Setiawan, A., Sos, S., Setiawan, A., & Sos, S. (2025). Opini publik: Teori dan praktek. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia: ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT.

Tabroni, R. (2012). Komunikasi politik pada era multimedia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Umaimah, W. Komunikasi Politik. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016).

Abelia, N., Farah, K. J., Wibisono, D., Mahmud, I., & Raidar, U. (2025). Dampak framing tagar #KaburAjaDulu terhadap opini publik dan kebijakan sosial di Indonesia. Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya, 2(2), Hal. 72.

Bakir, V., & McStay, A. (2021). Fake News and Media Transparency: The Role of Social Media in Public Opinion Formation. Journal of Media Ethics, 36(2), Hal. 125–140.

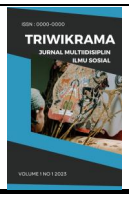

Istamala, N., Azizah, N., Nurahim, O., & Daryono, D. (2024). OPINI PUBLIK BERDASARKAN TEORI AGENDA SETTING PADA PROSESPERENCANAAN PEMINDAHAN IKN. Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi, 4(2), Hal. 74-87

Prasetya, N. M. Analisis framing dalam riset public relations. Informasi, 46(2), Hal. 195

Schwartz, S. H. (2021). The Influence of Cultural Values on Public Opinion: The Role of Norms and Social Identity. Journal of Social Values, 35(2), Hal. 101–115.

Mahmood, S. (2026). *Why Trump's Gaza Peace Plan Stops Short of Peace*. *International Policy Digest*.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ratnaningtyas, E. M., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain.

Virtuous, S. (2026, 9 April). Wawancara bersama Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas [Komunikasi pribadi].

Asrinaldi. (2026, 15 April). Wawancara bersama Ahli Politik Universitas Andalas [Komunikasi pribadi].

Tempo.com. (2026). *Mengenal Dewan Perdamaian yang Dibentuk Trump, Apa Tugasnya?* Diakses pada 17 April 2026 pukul 20.34 WIB, dari https://www.tempo.co/internasional/mengenal-dewan-perdamaian-yang-dibentuk-trump-apa-tugasnya--2109171#google_vignette

Detik.com. (2026). *Peran Indonesia di Board of Peace dan Tantangan di Dalam Negeri*. Diakses pada 17 April 2026 pukul 21.25 WIB, dari https://news.detik.com/kolom/d-8339879/peran-indonesia-di-board-of-peace-dan-tantangan-di-dalam-negeri

Hukumonline.com (2026) *Perjanjian Dagang AS-Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah, Masyarakat Sipil Bakal Gugat*, Diakses pada 26 April 2026 pukul 19.50 WIB, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-dagang-as-indonesia-terburuk-sepanjang-sejarah--masyarakat-sipil-bakal-gugat-lt699fc5af888b5/

Mahmood, S. (2026). Why Trump's Gaza Peace Plan Stops Short of Peace. International

Policy Digest. https://intpolicydigest.org/the-platform/why-trump-s-gaza-peace-plan-stops-short-of-peace/